



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2022



Jl. Beringin Telp. (0742) 21593 Facsmile (0742) 21593
<http://www.tanjabarkab.go.id>
KUALA TUNGKAL
KODE POS 36513

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas Rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini dapat diselesaikan.

Dalam Pelaksanaan Pembangunan, setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk membuat Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah terkait dengan Program dan Kegiatan untuk 1 (satu) tahun kedepan. Ini dimaksudkan untuk menjadi usulan Program dan Kegiatan dalam rangka penyusunan KUA-PPAS sampai kepada penyusunan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, agar supaya pelaksanaan Pembangunan dapat berjalan dengan baik, lancar dan berkesinambungan.

Berdasarkan pemahaman tersebut diatas, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyusun Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah ini dengan harapan dapat berguna dalam pencapaian target pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada khususnya dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada umumnya.

Kuala Tungkal, Juni 2021

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



II. A. TAHARUDDIN

Perdana UTama Muda

9620312 199009 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATAPENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II PERUMUSAN VISI DAN MISI DISKOMINFO	8
2.1 Visi dan Misi	8
2.2 Tujuan dan Sasaran	12
2.3 Strategi dan Kebijakan	14
BAB III EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2020.....	17
3.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu	17
3.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Berjalan	29
3.3 Analisis Pelaksanaan Pelayanan Diskominfo	38
BAB IV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	40
BAB VII PENUTUP.....	52

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2.	Tujuan dan Sasaran serta Indikator Pelayanan Pelayanan Jangkah Menegah Diskominfo	13
Tabel 2.3.	Hubungan Hirarki antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	16
Tabel 3.1	Evaluasi RenjaTahun Lalu	20
Tabel 3.2	Evaluasi Renja Tahun Berjalan (Tahun 2021)	30
Tabel 3.3	Alokasi Anggaran dan Penyerapan Anggaran sampai Tahun Anggaran 2018	32
Tabel 4.1	Rumusan Program dan Kegiatan Diskominfo Tahun 2020 .	43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja perangkat daerah merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan perangkat daerah khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja Perangkat Daerah memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja Perangkat Daerah merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah. Renja Perangkat Daerah berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama dari penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja Perangkat Daerah sangatlah menentukan terlaksananya kualitas pelayanan public yang lebih baik.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dimulai dengan persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah dengan mengumpulkan bahan pengolahan data dan informasi serta menganalisa gambaran pelayanan perangkat daerah untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja perangkat daerah tahun sebelumnya dan tahun berjalan akan sesuai dengan Renstra Perangkat Daerah yang didasarkan pada penelaahan RKPD yang selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan pada penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

Prinsip-prinsip penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu pada awal RKPD;
- b. Rumusan program/kegiatan didalam Renja perangkat daerah didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing perangkat daerah;
- c. Penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD dan merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan KUA-PPAS sampai dengan APBD;
- d. Rumusan program/ kegiatan didalam Renja perangkat daerah didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing perangkat daerah;
- e. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolak ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan pengeluaran dan total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n+1.

Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah dengan RKPD yang menjadi acuannya. Renja Perangkat Daerah memiliki hubungan keselarasan dengan dokumen perencanaan daerah lainnya seperti RPJMD, RTRW dan RPJPD. Sebaliknya Renja Perangkat Daerah dapat menjadi bahan masukan bagi penyusunan RKPD, Renstra Perangkat Daerah, RPJMD, Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah, KUA, PPAS dan RAPBD.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2022 ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara /Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan

Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);

18. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 470);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara dan Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
24. Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,

serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2022 adalah untuk melaksanakan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah periode1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2022 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dengan prakiraan maju Tahun 2023 serta menggambarkan capaian kinerja yang dapat ditransformasikan kedalam Renja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah serta menjadi Arah Kebijakan perencanaan pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika untuk mendukung terwujudnya Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah:

1. Sebagai tolok ukur dan alat bantu dalam pelaksanaan kegiatan Diskominfo;
2. Mendeskripsikan program-program prioritas yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan informatika KabupatenTanjung Jabung Barat;
3. Optimalisasi pelaksanaan program-program sesuai dengan yang diharapkan melalui focus pada program-program prioritas.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II PERUMUSAN VISI DAN MISI DISKOMINFO

- 2.1 Visi dan Misi
- 2.2 Tujuan dan Sasaran

2.3 Strategi dan Kebijakan

BAB III EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2021

3.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Triwulan Tahun 2021

BAB IV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

4.1 Rencana Program

4.2 Rencana Kegiatan

BAB VI PENUTUP

BAB II

PERUMUSAN VISI DAN MISI DISKOMINFO

2.1. Visi dan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika

Sebagai dasar dalam melaksanakan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam pengembangan teknologi informasi merumuskan visi dan misi sebagai berikut :

VISI.

“Terwujudnya Pelayanan Publik yang Terintegrasi dengan Berbasis Teknologi Informasi Menuju Tanjung Jabung Barat BERKAH 2024 (Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis)”.

Visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tanjung Jabung Barat tersebut diatas didefinisikan sebagai berikut :

- a. Tersedianya Sumber Daya Manusia dalam pemanfaatan sistem informasi melalui pendidikan dan pelatihan teknologi informasi dan komunikasi.
- b. Tersedianya jaringan yang lebih luas berupa WAN dan LAN (Internet dan Intranet) pada SKPD yang prioritas di lingkungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- c. Tersedianya Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) yang handal, berdaya guna dan berhasil guna serta dapat dipertanggung jawabkan.
- d. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasana teknologi informasi berbasis website, audio dan visual dengan dukungan dana yang memadai.

MISI.

Untuk dapat merealisasikan visi terwujudnya pelayanan publik yang terintegrasi dengan berbasis teknologi informasi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat Telah menetapkan misi sebagai langkah atau strategi untuk mencapai visi tersebut.

Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah :

- a. Mewujudkan ketersediaan Sumber Daya Manusia dalam pemanfaatan sistem informasi melalui pendidikan dan pelatihan teknologi informasi.
- b. Mewujudkan penyediaan jaringan interkoneksi pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- c. Meningkatkan layanan informasi pembangunan daerah (SIMDA) yang handal, berdaya dan berhasil guna yang dapat dipertanggung jawabkan.
- d. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana Teknologi Informasi berbasis website, audio dan audio visual dengan dukungan pendanaan yang memadai.
- e. Meningkatkan diseminasi data statistik sektoral dan mutu statistik daerah yang terintegrasi
- f. Penyediaan layanan keamanan informasi pemerintahan berbasis elektronik dan non elektronik.

Berdasarkan paparan Misi diatas, yang dimaksud dengan :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur (SDA) di bidang teknologi informasi dan komunikasi, untuk mengelolasisistem yang berada dilingkungan Kab. Tanjung Jabung Barat, berupa pengadministrasian computer pada jaringan yang dikembangkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tanjung Jabung Barat dengan mempersiapkan jaringandalam menjalankan aplikasi serta Meningkatkan literasi (kemampuan) dan profesionalisme Kinerja Kelembagaan adalah upaya untuk mengatur dan meningkatkan fungsi dan peran perangkat kelembagaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tanjung Jabung Barat berdasarkan kewenangan dan kondisi daerah dalam rangka

peningkatan Kinerja Pemerintah dan mengoptimalkan pendayagunaan teknologi informasi sekaligus sebagai upaya modernisasi system administrasi pemerintah menuju terwujudnya E-Government (tata kelola pemerintah berbasis elektronik).

2. Meningkatkan pemanfaatan sarana dan prasarana teknologi informasi secara efektif dan efisien adalah menyiapkan infrastruktur jaringan informasi yang berbasis teknologi di lingkungan Pemerintah, guna memudahkan user melakukan komunikasi dan pemanfaatan fasilitas teknologi informasi berupa aplikasi yang terintegrasi agar dapat diimplementasikan dalam kegiatan di OPD sehingga data dapat terangkum secara terpusat pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tanjung Jabung Barat dan dapat memanfaatkan fasilitas jaringan internet/intranet serta meningkatkan pengawasan terhadap kualitas infrastruktur jaringan telekomunikasi di lingkungan Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat.
3. Meningkatkan serta mewujudkan ketersediaan data/informasi secara cepat dan akurat serta keterpaduan sistem informasi antara Pusat dan Daerah dan antar Daerah, strategi ini dilakukan dengan mempertimbangkan kuantitas data dan letak geografis pemrosesannya untuk mempercepat proses arus komunikasi di lingkungan kerja Pemerintah Daerah untuk mendukung pengembangan aplikasi yang dituangkan dalam pola induk pengembangan fasilitas informasi dan komunikasi data dan sinergi pembangunan daerah yang partisipatif dan membuka keterhubungan informasi antara pemerintah pusat dengan daerah, antar daerah, dunia usaha dan sector-sektor lainnya untuk meningkatkan pelayanan informasi multi media kepada publik yang terprogram, akuntabel melalui website Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat sebagai perwujudan penerapan e-Government di lingkungan Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat dan meningkatkan kerjasama, kemitraan serta memberdayakan lembaga komunikasi dan informatika pemerintah dengan masyarakat, lembaga media massa.
4. Meningkatkan serta mewujudkan ketersediaan data/informasi secara cepat dan akurat serta keterpaduan sistem informasi antara Pusat dan

Daerah dan antar Daerah, strategi ini dilakukan dengan mempertimbangkan kuantitas data dan letak geografis pemrosesannya untuk mempercepat proses arus komunikasi di lingkungan kerja Pemerintah Daerah untuk mendukung pengembangan aplikasi yang dituangkan dalam pola induk pengembangan fasilitas informasi dan komunikasi data untuk menciptakan keterpaduan dan sinergi pembangunan daerah yang partisipatif dan membuka keterhubungan informasi antara pemerintah pusat dengan daerah, antar daerah, dunia usaha dan sektor-sektor lainnya dan meningkatkan kerjasama dan kemitraan serta memberdayakan lembaga komunikasi dan informatika pemerintah dengan masyarakat, lembaga media massa, dokumentasi dan monitoring pendapat umum.

MOTTO

Mendorong percepatan pencapaian Visi dan Misi, maka dirumuskan Motto Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

“KOMUNIKASI INFORMASI TERARAH CEPAT DAN AKURAT”

2.2. Tujuan dan Sasaran serta Indikator Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika

Tujuan merupakan uraian dari misi Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Tanjung Jabung Barat yang akan dicapai pada 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan dapat disampaikan sebagai berikut: Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sebagai gambaran tentang kondisi yang ingin dicapai dimasa datang. Untuk itu, tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari visi dan misi. Tujuan dan sasaran hendaknya merupakan arsitektur kinerja tertinggi atau *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang 5 (lima) tahun ke depan. Untuk itu, *impact* harus memberi pengertian sebagai *ultimate goal* dari keseluruhan kinerja utama

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sebagaimana tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2
Tujuan dan Sasaran serta Indikator Sasaran Jangka Menengah
Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No	TUJUAN	Sasaran Startegis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Pemanfaatan TIK dan Layanan Inforamasi Publik	1. Persentase Partisipasi aktif lembaga komunikasi Publik dalam pengelolaan komuniikasi Publik	100%
			2. IKM Layanan Website Tanjab Barat	75%
		Meningkatnya Pemanfaatan TIK dalam Pengamanan Informasi	3. Persentase Pemanfaatan Hosting dan Collocation	85%
			4. Persentase OPD yg memiliki aplikasi E-Government	97%
2.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dasar Komunikasi dan Informatika yang berkualitas	Meningktanya Ketersediaan data dan Informasi yang terpercaya dan Berkualitas	5. Persentase rilis data yang akurat dan tepat waktu	90%
			6. Persentase layanan keamanan informasi berbasis elektronik dan non elektronik	90%

2.3 Strategi dan Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai yang diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Perumusan strategi adalah proses yang kompleks dimana tujuan-tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang merupakan wewenang, visi, misi, maupun nilai-nilai yang akan diserap dan diracik menjadi strategi-strategi yang objektif. Strategi yang telah dirancang tersebut selanjutnya diuraikan dalam

berbagai kebijakan. Selanjutnya, masing-masing kebijakan diformulasikan ke dalam program-program. Berdasarkan analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang telah diidentifikasi, ditetapkanlah strategi pembangunan Komunikasi dan Informatika yang merupakan arah yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi yang ditempuh untuk mewujudkan visi dan misi adalah sebagai berikut :

Strategi Sektor Komunikasi dan Informatika :

- a. Membangun Jaringan Komunikasi data antar OPD dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- b. Meningkatkan jumlah OPD dalam Kab. Tanjung Jabung Barat terhubung jaringan internet
- c. Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
- d. Mengembangkan dan menyelenggarakan system pelayanan informasi publik
- e. Meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan di Kab. Tanjung Jabung Barat melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi
- f. Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik
- g. Meningkatkan kuantitas dan kualitas informasi kepada masyarakat melalui berbagai media.
- h. Mengembangkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Bidang TIK

Kebijakan merupakan pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam menentukan kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menetapkan beberapa kebijakan pembangunan untuk lima tahun kedepan yaitu :

- a. Membangun saluran komunikasi data antar OPD dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- b. Melaksanakan Pengembangan dan pemeliharaan jaringan internet dan intranet lingkup pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat
- c. Meningkatkan pengawasan menara telekomunikasi .

- d. Membangun system layanan informasi publik
- e. Menyelenggaran penilaian dan pembinaan kepada masyarakat dan komunitas berbasis teknologi informasi dan komunikasi di Kab. Tanjung Jabung Barat
- f. Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik.
- g. Melaksanakan penyelenggaran layanan komunikasi pendukung penerapane-Government di pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- h. Meningkatkan pendidikan dan pelatihan yang bersertifikat di bidang TIK.

Hubungan hirarkis antara tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan Komunikasi dan Informatika Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini:

Tabel 2.3

Hubungan Hirarki antara Tujuan, Sasaran, Strategi, dan kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
<p>Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik</p>	<p>Meningkatnya Pemanfaatan TIK dan Layanan Inforamasi Publik</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mengembangkan dan Menyelenggarakan system pelayanan Informasi Publik - Meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan di kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui pemamfaatan TIK 	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun system Layanan Informasi Publik - Menyelenggaran penilaian dan pembinaan kelompok masyarakat berbasis Teknologi Informasi & Komunikasi di Kab. Tanjung Jabung Barat
	<p>Meningkatnya Pemanfaatan TIK dalam Pengamanan Informasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan Penyelenggaran Tata Kelola Pemerintahan yang Berbasis Elektronik - Meningkatkan kuantitas dan kualitas informasi kepada masyarakat melalui berbagai media - Mengembangkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Bidang TIK 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik - Melaksanakan penyelenggaran layanan komunikasi pendukung penerapan e-Government di pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat - Menigkatkan pendidikan dan pelatihan yang bersertifikat di bidang TIK

<p>Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dasar Komunikasi dan Informatika yang berkualitas</p>	<p>Meningktanya Ketersediaan data dan Informasi yang terpercaya dan Berkualitas</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun Jaringan Komunikasi data antar OPD dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat. - Meningkatkan jumlah OPD dalam Kab. Tanjung Jabung Barat terhubung jaringan internet - Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun Saluran Komunikasi Data antar OPD dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat - Melaksanakan Pengembangan dan pemeliharaan jaringan internet dan intranet lingkup pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat - Meningkatkan Pengawasan Menara Telekomunikasi
--	---	---	---

BAB III

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2020

3.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu (Renja 2020)

Secara garis besar sesuai tugas dan fungsi Diskominfo, kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat baru berjalan hampir 4 (empat) Tahun, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat terbentuk pada akhir tahun 2016 dan baru memulai ditahun 2017 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 51 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara dan Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah.

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun lalu (Tahun 2020) dan evaluasi pelaksanaan renja tahun berjalan (renja 2021) adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan dan realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022, memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
2. Tujuan yang dikehendaki;
3. Sasaran–sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
4. Kebijakan–kebijakan dalam pelaksanaannya;

Disamping itu penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022, juga memperhatikan hal–hal sebagai berikut:

1. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2020 dan hasil evaluasi capaian kinerja tahun berjalan (renja 2021) sebagai bahan dan acuan dalam penyusunan perencanaan tahun 2022;
2. Pembangunan keberlanjutan (*sustainable development*) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan.
3. Masalah–masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;

Realisasi Pelaksanaan Renja Tahun 2020 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada tabel 3.1. sebagai berikut :

Renja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Periode Pelaksanaan : 2 Januari s.d 31 Desember 2020

Sasaran	Kode Rekening	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perang kat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra Perang kat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020)	Target Kinerja dan anggaran Renja Perangkat daerah tahun berjalan (2021) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun (2020)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun...)		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2020 (%)	unit Perang kat daerah yang bertan ggung Jawab		
							I		II		III		IV			13 = 6 + 12				14 + 13/5 x 100%	
							K	R p	K	R p	K	R p	K	R p		K	R p			K	R p
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pelayanan publik dan Keuangan	0 1 0 0 2 0 1 1 . . .	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	99 % 6.450.446.739	50% 3.236.558.193	100 % 1.097.219.998	18,0 4% 197.920.308	28,5 2% 312.907.966	33,1 9% 364.121.322	27,1 3% 297.659.662	106, 87% 1.172.609.258	78,5 2% 4.409.167.451	79,3 2% 68,3 5%	Diskominfo							
	0 1 0 0 0 2 0 1 1. 1 . . .	Keg. Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	268 0 14.100.000	1900 6.810.000	650 2.850.000	166 270.000	170 910.000	540.000	1.080.000	336 2.800.000	2236 9.610.000	83,4 3% 68,1 6%	Diskominfo							
	0 1 0 0 0 2 0 1 1. 2 . . .	Keg. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60 1.909.909.288	36 1.586.360.629	12 1.338.000.000	3 18.459.840	3 14.563.553	3 17.496.727	39.478.375	9 89.998.495	45 1.676.359.124	75,0 0% 87,7 7%	Diskominfo							

	0 2	1 0	0 1	0 1.	0 7	Keg. Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	60	625.966.710	36	274.800.000	12	127.990.000	3	28.822.500	3	32.665.500	3	31.807.500	35.022.500	9	128.318.000	45	403.118.000	75,00%	64,40%	Diskominfo
	0 2	1 0	0 1	0 1.	0 8	Keg. Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	60	122.092.059	36	54.050.150	12	21.547.153	3	5.440.253	3	5.728.100	3	4.902.800	5.443.200	9	21.514.353	45	75.564.503	75,00%	61,89%	Diskominfo
	0 2	1 0	0 1	0 1.	1 0	Keg. Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	208	274.247.586	139	118.945.950	52	49.408.190	10	6.821.850	14	12.784.400	17	20.229.700	9.539.000	41	49.374.950	180	168.320.900	86,54%	61,38%	Diskominfo
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pelayanan publik dan Keuangan	0 2	1 0	0 1	0 1.	1 1	Keg. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	60	103.593.126	36	111.822.950	12	27.706.360	3	345.000	3	1.340.000	3	4.100.000	17.991.000	9	23.776.000	45	135.598.950	75,00%	130,90%	Diskominfo
	0 2	1 0	0 1	0 1.	1 2	Keg. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	60	18.490.118	36	8.595.900	12	3.038.295	3	506.595	3	639.400	3	1.399.900	475.600	9	3.021.495	45	11.617.395	75,00%	62,83%	Diskominfo
	0 2	1 0	0 1	0 1.	1 5	Keg. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan	60	30.792.072	36	17.710.000	12	6.000.000	3	-	3	2.400.000	3	1.440.000	1.920.000	9	5.760.000	45	23.470.000	75,00%	76,22%	Diskominfo
	0 2	1 0	0 1	0 1.	1 7	Keg. Penyediaan makanan dan minuman rapat	Tersedianya makanan dan minuman rapat	60	21.255.780	36	11.945.000	12	4.200.000	3	-	3	2.100.000	3	700.000	1.400.000	9	4.200.000	45	16.145.000	75,00%	75,96%	Diskominfo

	0 2	1 0	0 1	0 3	0 .	Pprogram Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Meningkat nya kinerja dan disiplin Aparatur	100 %	212.462.500	33%	70.185.872	100 %	32.624.400	0,00 %	99,9 6%	32.612.000	0,00 %	99,9 6%	32.612.000	199, 92%	65.224.000	232, 96%	135.409.872	232, 96%	64%	Disko minfo	
	0 2	1 0	0 1	0 3	0 2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas pegawai	408	212.462.500	168	70.185.872	62	32.624.400	0	62	32.612.000	-	-	-	62	230	102.797.872	56,3 7%	48,3 8%	Disko minfo		
	0 2	1 0	0 1	0 5	0 .	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Persentase Meningkat nya Kapasitas sumber daya manusia	240 %	281.050.000	33%	65.508.300	100 %	40.000.000	12,5 0%	26,2 5%	15.500.000	34,2 5%	0%	8.500.000	29.000.000	73,0 0%	58.000.000	106, 33%	123.508.300	44,3 1%	44%	Disko minfo
	0 2	1 0	0 1	0 5	0 5	Pengembangan SDM	Jumlah Aparatur yang mengikuti kursus, bumtek	45	281.050.000	15	65.508.300	8	40.000.000	1	4	15.500.000	2	8.500.000	29.000.000	7	22	94.508.300	48,8 9%	33,6 3%	Disko minfo		
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pelayanan publik dan Keuangan	0 2	1 0	0 1	0 6	0 .	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Meningkat nya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	240 %	396.181.430	33%	76.610.000	100 %	40.340.000	9,30 %	30,4 1%	12.270.000	27,5 0%	0%	11.095.000	41.972.500	67,2 1%	41.972.500	100, 55%	118.582.500	41,8 9%	30%	Disko minfo
	0 2	1 0	0 1	0 6	0 4	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya pelaporan keuangan semesteran dan akhir tahun	60	224.624.400	20	35.600.000	20	14.650.000	0	5	4.500.000	1	7.345.000	2.745.000	6	26	50.190.000	43,3 3%	22,3 4%	Disko minfo		

	0 2	1 0	0 1	0 6	2 8	Sinkronisasi penyusunan Renja, RKA, RKA Perubahan, LKj dan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja	Tersedianya dokumen Renja, RKA, RKAP, Lakip dan Laporan kegiatan akhir tahun	60	171.557.030	20	41.010.000	20	25.690.000	5	3.750.000	7	7.770.000	2	3.750.000	12.112.500	14	27.382.500	34	68.392.500	56,67%	39,87%	Diskominfo	
Meningkatnya Pemanfaatan TIK dan Layanan Informasi Publik	0 2	1 0	0 1	1 9	1 9	Program Layanan Pengelolaan Informasi Komunikasi dan Opini Publik	Persentase Tersedianya Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	400%	3.771.120.087	100%	1.353.137.000	100%	511.345.000	10,93%	52.900.000	30,73%	159.200.000	30,72%	158.000.000	0%	680.984.000	72,38%	680.984.000	172,38%	2.034.121.000	43,10%	54%	Diskominfo
	0 2	1 0	0 1	1 9	0 1	Keg. Fasilitas Kemitraan Layanan Komunikasi Publik	Jumlah fasilitas kemitraan layanan komunikasi publik	32	943.260.045	12	580.335.600	3	177.000.000	1	4.500.000	1	21.000.000	1	87.750.000	126.000.000	3	239.250.000	15	819.585.600	46,88%	86,89%	Diskominfo	
	0 2	1 0	0 1	1 9	0 3	Keg. Pemuktakhiran Informasi Portal Induk Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat	Tersedianya layanan informasi induk pemerintah kab. Tanjung Barat	160000	812.540.000	80000	361.867.400	40000	80.400.000	10000	13.000.000	10000	18.900.000	10000	21.050.000	27.234.000	30000	80.184.000	110000	442.051.400	68,75%	54,40%	Diskominfo	
Meningkatnya Pemanfaatan TIK dan Layanan Informasi Publik	0 2	1 0	0 1	1 9	0 5	Keg. Penyediaan Jasa Hosting	Tersedianya hosting service untuk kepentingan pemerintah kab. Tanjung Barat	48	441.591.150	24	107.805.000	12	90.150.000	0	-	9	74.900.000	3	15.000.000	19.605.000	12	109.505.000	36	217.310.000	75,00%	49,21%	Diskominfo	

0 2	1 0	0 1	1 9	0 6	Keg. Peliputan dan Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Daerah	Penyebaran dan pemerataan informasi publik yang beragam dan berkualitas	1440	660.948.015	500	118.200.000	360	137.800.000	90	33.000.000	90	42.000.000	90	31.800.000	100.450.000	270	207.250.000	770	325.450.000	53,47%	49,24%	Diskominfo	
0 2	1 0	0 1	1 9	0 7	Keg. Pembinaan, Pengembangan dan Pemberdayaan KIM	Terlaksananya pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan KIM	12	912.780.877	6	184.929.000	3	25.995.000	0	2.400.000	0	2.400.000	0	2.400.000	37.595.000	0	44.795.000	6	229.724.000	50,00%	25,17%	Diskominfo	
0 2	1 0	0 1	2 0	0	Program Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase OPD dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Berbasis Elektronik	400%	2.836.900.280	100,00%	896.251.952	100,00%	103.700.000	15,19%	15.750.000	15,19%	15.750.000	15,62%	15.750.000	0,00%	102.850.000	46,00%	150.100.000	146,00%	999.101.952	36,50%	35,22%	Diskominfo
0 2	1 0	0 1	2 0	0 2	Keg. Sekretariat LPSE	Tersedianya layanan informasi pengguna SPSE bagi penyediaan dan non penyediaan	48	1.238.003.400	24	293.318.700	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	24	293.318.700	50,00%	23,69%	Diskominfo	
0 2	1 0	0 1	2 0	0 3	Keg. Maintance Perangkat LPSE	Terlaksananya pengecekan dan servic berkala perangkat LPSE	48	454.818.000	12	97.640.000	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	12	97.640.000	25,00%	21,47%	Diskominfo	
0 2	1 0	0 1	2 0	0 2	Keg. Pembangunan dan Pengembangan Sisrem E-Government	Tersedianya aplikasi sistem informasi berbasis data bace di lingkungan Pemda Tanjab Barat	176	569.821.980	44	120.650.000	44	51.500.000	11	4.500.000	11	4.500.000	10	4.500.000	37.510.000	32	51.010.000	76	171.660.000	43,18%	30,13%	Diskominfo	

Meningkatnya Pemanfaatan TIK dan Layanan Informasi Publik	0 1 0 2 0 2 0 1 0 3	Keg. Pengembangan dan Pemeliharaan Portal Perangkat Daerah	Tersedia portal perangkat daerah	176	88	44	11	11	11	11	33	121	377.174.250	68,75%	73,28%	Diskominfo
	0 1 0 2 0 2 0 1 0 7	Keg. Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	Jumlah peserta Sosialisasi pelaksanaan manajemen pengelolaan informasi dan dokumentasi	200	50	0	0	0	0	0	0	50	59.309.002	25,00%	99,56%	Diskominfo
Meningkatnya Keterseediaan data dan Informasi yang terpercaya dan Berkualitas	0 1 0 2 0 2 0 1 1 1	Program Pembangunan, Pengawasan dan Peningkatan Pemamfaatan Teknologi	Terintegrasi Jaringan Komunikasi Data antar OPD dalam Kab. Tanjung Jabung Barat Meningkatkan Pengawasan Menara Telekomunikasi	300%	31,45%	100,00%	3,10%	4,81%	41,09%	0,00%	49,00%	80,45%	4.266.608.014	26,82%	28,42%	Diskominfo
	0 1 0 2 0 2 0 1 1 1	Keg. Pengembangan dan pemeliharaan telematika	Tersedia jaringan komunikasi data dan bandwidth	124	39	44	2	7	18	27	66	2.661.871.557	53,23%	23,15%	Diskominfo	
	0 1 0 2 0 2 0 1 1 2	Keg. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Tersusunnya daftar informasi publik (DIP)	4	1	1	0	1	0	1	2	180.330.000	50,00%	25,00%	Diskominfo	

Meningkatnya Keterseediaan data dan Informasi yang terpercaya dan Berkualitas	0 2	1 0	0 1	2 1	0 3	Keg. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penyiaran	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penyiaran	12	8	4	1	1	1		3	11	91,67%	53,97%	Diskominfo
								647.744.370	256.085.000	30.400.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000	82.256.450	93.506.450	349.591.450			
	0 2	1 0	0 1	2 1	0 4	Keg. Pengawasan dan Pengendalian Data Informatika	Tercapainya pengawasan, pengendalian dan informasi	44	4	10	2	3	2		7	11	25,00%	8,62%	Diskominfo
								1.510.698.200	66.260.000	64.900.000	9.300.000	10.900.000	9.300.000	34.425.000	63.925.000	130.185.000			
	0 2	1 0	0 1	2 1	0 4	Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Sandi	Meningkatkan kualitas sandi melalui SSB	36	12	6	1	2	2		5	17	47,22%	32,51%	Diskominfo
								632.234.419	152.230.000	57.600.000	5.325.000	5.325.000	5.325.000	37.329.000	53.304.000	205.534.000			
Rata-rata capaian kinerja (%)															91,86%				
Predikat kinerja															Sangat Baik				
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																			
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya *):																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota berikutnya *):																			

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa Renja Tahun 2020 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang terdiri 8 (Delapan) program kerja dan 32 (Tiga Puluh Dua) kegiatan, target kinerja sampai dengan akhir Tahun 2020 terealisasi 100 persen, hal ini menunjukkan kinerja yang sangat baik, sehingga anggaran yang dialokasikan dapat diserap secara optimal.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pengelolaan pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) harus terus diupayakan secara terencana dan sistematis agar kapasitas personil baik individu maupun tim/kelompok bisa ditingkatkan dan dikembangkan secara lebih profesional, proaktif dan kolektif/tim, sehingga diharapkan dimasa akan datang menjadi personil yang mumpu dan kapabel bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kapasitas ideal yang dapat dikembangkan dalam pengelolaan sumber daya manusia/aparatur antara lain mencakup lima aspek masing-masing :

1. Kapasitas untuk berkreasi atau berproduksi;
2. Pemerataan distribusi komposisi personil sesuai kapasitas dan kualifikasinya;
3. Pemberian keleluasaan dan wewenang;
4. Kesempatan untuk berkembang (*sustainable*);
5. Kesadaran akan interdependensi.

Lima aspek pengelolaan sumber daya manusia di atas dapat terus ditingkatkan dan dikembangkan, karena dengan sumber daya manusia yang berkualitas menjadi modal utama dan potensial dalam menentukan dan menggerakkan segenap potensi yang ada dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

3.2. Evaluasi Renja Tahun Berjalan (Tahun 2021)

Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun berjalan sampai dengan triwulan I (Januari s.d Maret 2021) dan Capaian Kinerja program dan kegiatan Tahun 2021 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan target indikator kinerja program/kegiatan dapat dilihat pada tabel 3.2 sebagai berikut :

2	16.	01.	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		60	3.957.264.149		12	3	3.957.264.149		0			3	3	3.957.264.149	3.957.264.149	5,00 %	100,00 %	Diskominfo
2	16.	01.	2.02	01	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	60	3.770.074.149		12	3	3.770.074.149		0			3	3	3.770.074.149	3.770.074.149	5,00 %	100,00 %	Diskominfo
2	16.	01.	2.02	02	<i>Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN</i>	Tersedianya jasa administrasi keuangan	60	141.340.000		12	3	141.340.000		0			3	3	141.340.000	141.340.000	5,00 %	100,00 %	Diskominfo
2	16.	01.	2.02	05	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	Tersedianya laporan capaian kinerja program dan kegiatan	60	45.850.000		12	3	45.850.000		0			3	3	45.850.000	45.850.000	5,00 %	100,00 %	Diskominfo
2	16.	01.	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	60	535.787.055		12	3	535.787.055		0			3	3	535.787.055	535.787.055	5,00 %	100,00 %	Diskominfo
2	16.	01.	2.06	01	<i>Penyediaan Komponen Intalasi Listrk/Penerangan Bangunan Kantor</i>	Terbayarnya Penyediaan Komponen Intalasi Listrk/Penerangan Bangunan Kantor	12	3.044.106		3	3	3.044.106		0			3	3	3.044.106	3.044.106	25,00 %	100,00 %	Diskominfo
2	16.	01.	2.06	02	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	Tersedianya alat tulis kantor yang memadai	51	25.000.027		51	12	25.000.027		0			12	12	25.000.027	25.000.027	23,53 %	100,00 %	Diskominfo

2	16.	01.	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Makanan dan Minuman	12			12		3			0				3	3	18.200.000	18.200.000	25,00 %	100,00 %	Diskominfo
2	16.	01.	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12	12	12	12	3				0				3	15	21.926.922	49.633.282	125,00 %	226,36 %	Diskominfo
2	16.	01.	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12	60	12	12	3	1		2.437.000	0				4	64	6.000.000	39.394.522	533,33 %	656,58 %	Diskominfo
2	16.	01.	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi keluar daerah	12	12	12	12	12	5			0				17	29	461.616.000	1.182.296.000	241,67 %	256,12 %	Diskominfo
2	16.	01.	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		60								0				0	0	105.361.265		0,00 %	0,00 %	Diskominfo
2	16.	01.	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		675	650	675		0	1			0				1	651	2.850.000	4.275.000	96,44 %	150,00 %	Diskominfo
2	16.	01.	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12	12	12		4				0				4	16	72.000.000	156.000.000	133,33 %	216,67 %	Diskominfo
2	16.	01.	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		12		12		3	1			0				4	4	30.511.265	30.511.265	33,33 %	100,00 %	Diskominfo

2	16.	01.	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		60											0	0	0,00 %	0,00 %	Diskominfo	
							208.927.700																
2	16.	01.	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kelancaran Kegiatan Organisasi	12	12	12	3				0,00 %	3	7,5		134.850.000	324.100.000	62,50 %	240,34 %	Diskominfo	
							134.850.000	189.250.000	134.850.000	134.850.000													
2	16.	02			PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		99 %	100 %	100 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	50,00 %				50,51 %	0,00 %	Diskominfo	
							2.344.899.850		2.344.899.850														
2	16.	02.	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		99 %	100 %	100 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	50,00 %				50,51 %	0,00 %	Diskominfo	
							2.344.899.850		2.344.899.850														
2	16.	02.	2.01.	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	terbangunnya citra pemerintah kabupaten tanjung jabung barat melalui opini publik	100 %		100 %	0	0	0			0	0		45.875.000	45.875.000	0,00 %	100,00 %	Diskominfo	
							45.875.000		45.875.000	45.875.000													
2	16.	02.	2.01.	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penyiaran	4		4	1		0			1	1		39.450.000	39.450.000	25,00 %	100,00 %	Diskominfo	
							39.450.000		39.450.000	39.450.000													
2	16.	02.	2.01.	06	Pelayanan Informasi Publik	Ketersediaan informasi dan meningkatnya layanan informasi publik	1		1	0					0	0		44.484.000	44.484.000	0,00 %	100,00 %	Diskominfo	
							44.484.000		44.484.000	44.484.000													

2	16.	02.	2.01.	07	Layanan Hubungan Media	Terselenggaranya Layanan Hubungan Media	3	1.890.800.000			3	0	1.890.800.000					0	0	1.890.800.000	1.890.800.000	0,00%	100,00%	Diskominfo
2	16.	02.	2.01.	08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Fasilitasi kemitraan layanan komunikasi publik	3	324.290.850			3	0	324.290.850					0	0	324.290.850	324.290.850	0,00%	100,00%	Diskominfo
2	16.	03.			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA		100%	1.938.090.000			100%	0,00%	1.938.090.000			0	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%	0%	Diskominfo
2	16.	03.	2.02		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		100%	1.938.090.000			100%	0,00%	1.938.090.000			0	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%	0%	Diskominfo
2	16.	03.	2.02.	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah OPD yang menyampaikan Data di Aplikasi Satu Data	44	46.850.000			44	11	46.850.000	0	0			62	62	46.850.000	46.850.000	140,91%	100,00%	Diskominfo
2	16.	03.	2.02.	04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Tercapainya pengembangan, pemeliharaan telematika dan jaringan telekomunikasi	105	1.616.340.000			105	26	1.616.340.000	0	0			26	26	1.616.340.000	1.616.340.000	24,76%	100,00%	Diskominfo
2	16.	03.	2.02.	06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik		9	61.700.000			9	3	61.700.000		0			3	3	61.700.000	61.700.000	33,33%	100,00%	Diskominfo

2	16.	03.	2.02.	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Tersedianya Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3	47.700.000		3	47.700.000	1	4	5.060.000	0			5	5	52.760.000	52.760.000	166,67%	110,61%	Diskominfo
2	16.	03.	2.02.	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi	Tersedianya Layanan Informasi Portal Induk Pemerintah Kab. Tanjab Barat	12	99.100.000		12	99.100.000	3			0			3	3	99.100.000	99.100.000	25,00%	100,00%	Diskominfo
2	16.	03.	2.02.	11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Tersedianya Portal Perangkat Daerah yang handal dan mutakhir	44	66.400.000		44	66.400.000	11			0			11	11	66.400.000	66.400.000	25,00%	100,00%	Diskominfo
																		33,3						
																		3%						
																		Baik						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya *):																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota berikutnya *):																								

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Renja tahun berjalan tahun 2021 sampai dengan triwulan I (Januari s.d Maret 2021) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang terdiri 3 (Tiga) program kerja dan 27 (Dua Puluh Tujuh) kegiatan, target kinerja sampai dengan akhir triwulan I tahun 2021 terealisasi sebesar 33,3 % hal ini menunjukkan kinerja yang baiknamun masih dalam tahap proses belum terealisasi sesuai dengan target yaitu 100% hal ini diakibatkan karena ada babarapa kegiatan yang belum dilaksanakan terkait dengan baru diawal tahun dan pematangan kegiatan itu sendiri, oleh karena itu diupayakan pada akhir tahun 2021 atau triwulan IV pelaksanaan renja tahun berjalan akan dilaksanakan sesuai dengan target kinerja secara optimal sehingga anggaran yang dialokasikan dapat terserap dengan maksimal juga.

3.3 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupten Tanjung Jabung Barat sampai dengan Tahun 2020

Secara keseluruhan, program dan kegiatan yang telah dianggarkan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat sampai dengan akhir tahun anggaran 2020 telah mencapai target keluaran dengan tingkat pencapaian realisasi kinerja sebesar 78,53% dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 2.564.750.044,- dari total anggaran 3.265.894.667,- atau 78,53%.Halini menunjukkan bahwa tingkat kinerja dan penyerapan anggaran pada tahun anggaran 2020 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat sampai akhir tahun 2020 baik.

Alokasi dan realisasi anggaran belanja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2020 sebesar **Rp. 7.029.987.617,-** yang terdiri dari :

1. Belanja Tidak Langsung sebesar**Rp. 3.764.092.950,-**realisasi anggaran sampai triwulan ke IV (Nopember 2020)sebesar Rp.**310.367.743,-** atau **8,25%**, dengan target realisasi Kinerja sebesar **100 %**

2. Belanja Langsung sebesar **Rp. 3.265.894.667,-**dengan realisasi anggaran sampai triwulan IV (Nopember2020) sebesar **Rp. 2.564.750.044,-**atau **78,12 %** dengan target realisasi Kinerja sebesar **100 %**.

Alokasi Anggaran dan realisasi penyerapan anggaran sampai akhir Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tergambar pada Tabel 3.2 sebagai berikut :

Tabel 3. 3

Alokasi Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Triwulan IV Tahun Anggaran 2020

NO	PROGRAM/KEGIATAN		PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	
				Rp.	%
I.	PENDAPATAN		Rp 300.000.000	Rp 300.000.000,00	120,27%
	1.	Pendapatan Retribusi Daerah	Rp 300.000.000	Rp 45.180.000,00	120,27%
II.	BELANJA		Rp 7.029.987.617	Rp 2.875.117.787	40,90%
III.	BELANJA TIDAK LANGSUNG		Rp 3.764.092.950	Rp 310.367.743	8,25%
	1.	GAJI	Rp 1.737.042.300	Rp 226.489.740	13,04%
	2.	Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja	Rp 1.437.800.000	Rp -	%
VI.	BELANJA LANGSUNG		Rp 3.265.894.667	Rp 2.564.750.044	78,12%

Dari tabel 3.3 tergambar bahwa disamping sebagai dinas teknis yang merumuskan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga menjadi salah satu dinas penghasil untuk peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) berupa retribusi Menara Telekomunikasi. Pada tahun anggaran 2020 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menetapkan target pendapatan asli daerah (PAD) melalui kegiatan pendapatan retribusi daerah sebesar **rRp. 300.000.000,-** dan telah terealisasi sebesar **Rp.**

300.666.000,- atau **100,22%**, ini menunjukkan kinerja dan pencapaian target yang sangat baik, hal ini diakibatkan oleh pihak perusahaan penyedia menara telekomunikasi yang mayoritas menyetor retribusi menara dan telekomunikasi di akhir tahun 2020 atau pada triwulan IV tahun 2020.

BAB IV

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat difokuskan pada upaya menunjang pelaksanaan tugas pembangunan di bidang komunikasi dan informatika diarahkan kepada peningkatan kualitas infrastruktur Jaringan Interkoneksi antar perangkat daerah dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan sumber daya manusia (SDM), sehingga tercipta aparatur yang mampu menangani masalah-masalah komunikasi dan informatika secara kompeten dan profesional, upaya peningkatan koordinasi dan kerjasama antar *stakeholders*, sehingga akan terwujud program yang bersinergi, upaya peningkatan pelayanan publik yang berpengaruh terhadap pos-pos pendapatan asli daerah (PAD) dan penguatan peran kelembagaan/instansi untuk memperoleh dukungan anggaran agar program-program kerja dan kegiatan dapat terealisasi.

Prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengacu pada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat yakni **“Menuju Tanjung Jabung Barat BERKAH 2024”** (Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis).

Pada tahun 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat melaksanakan 3 program yang terdiri dari 1 program rutin dan 2 program pokok yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Diskominfo dan di implementasikan didalam Rencana Kerja dan merupakan hasil mapping (pemetaan) berdasarkan Permendagri No.90 Tahun 2019 dan dari penyusunan renja tahun sebelumnya, adapun rencana program/kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Program Rutin / Penunjang antara lain :

**I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA**

I.1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

I.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4. Penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahun SKPD
6. "Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

I.3 Administrasi Umum Perangkat Daerah

7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
9. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
10. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
11. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
12. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

I.4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

13. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
14. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
15. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

I.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

16. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
17. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan Dinas
18. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
19. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
20. Pengadaan Mebel

I.6. Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

21. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

22. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Program Pilihan/Prioritas antara lain :

II. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

II.7. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

23. Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
24. Pengelolaan Media Komunikasi Publik
25. Pelayanan Informasi Publik
26. Layanan Hubungan Media
27. Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan
28. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas

III. PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA

III.8. Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

29. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

III.9. Pengelolaan e-government Dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

30. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
31. Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
32. Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)

IV. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

IV.10 Penyelenggaraan Statistik Sektoral Dilingkup Daerah Kabupaten/Kota

33. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral

V. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

V.11 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah kabupaten/Kota

34. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
35. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2022

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 yang terdapat dalam Awal Rencana Kerja (Ranwal Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2022 terdiri 3 (Tiga) program, 7 Kegiatan dan 35 Sub Kegiatan yang didanai oleh APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut :

TABEL 4.1
Rumusan Rencana Kerja Program Kegiatan dan Sub Kegiatan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tanjung Jabung Barat
Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023

No	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana 2023	
			Lokasi	Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Berjalannya Pelayanan Administrasi, Kinerja Perangkat Daerah dan Keuangan OPD	KAB. TANJABBAR	12 Bulan/Dokumen/Laporan/Orang/Unit/4 Media/Berita/Aplikasi/Lembaga Penyiaran/4 OPD	14.728.683.319	APBD		12 Bulan/Dokumen/Laporan/Orang/Unit/4 Media/Berita/Aplikasi/Lembaga Penyiaran/4 OPD	14.728.683.319
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Berjalannya Pelayanan Administrasi perkantoran dengan lancar (rata-rata bulan), Kinerja Perangkat Daerah dan Keuangan	DISKOMINFO	12 Bulan/Dokumen/Laporan/Orang/Unit	5.284.583.469	APBD		12 Bulan/Dokumen/Laporan/Orang/Unit	5.284.583.469
(01)	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan pemenuhan dokumen nilai	DISKOMINFO	Dokumen	91.920.000	APBD		Dokumen	91.920.000

			AKIP "B" dan Keuangan						
01	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan dan pelaporan</i>	DISKOMINFO	4 Dokumen	61.920.000	APBD		4 Dokumen	61.920.000
02	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen Renstra dan Renja</i>	DISKOMINFO	2 Dokumen	30.000.000	APBD		2 Dokumen	30.000.000
(02)	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan dan pelaporan yang disusun	DISKOMINFO	Bulan/Orang/Dokumen/Laporan	3.997.264.149	APBD		Bulan/Orang/Dokumen/Laporan	3.997.264.149
03	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Jumlah ASN yang dibayarkan gaji /Tunjangan</i>	DISKOMINFO	27 Orang	3.770.074.149	APBD		27 Orang	3.770.074.149
04	<i>Penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	<i>Jumlah Pembayaran tenaga administrasi keuangan</i>	DISKOMINFO	20 Org	141.340.000	APBD		20 Org	141.340.000
05	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahun SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Akutansi OPD</i>	DISKOMINFO	1 Laporan (Dokumen)	45.850.000	APBD		1 Laporan (Dokumen)	45.850.000
06	<i>Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran</i>	DISKOMINFO	12 Laporan	40.000.000	APBD		12 Laporan	40.000.000
(03)	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Berjalannya Pelayanan Administrasi perkantoran dengan lancar (rata-rata bulan), Kinerja Perangkat Daerah dan Keuangan	DISKOMINFO	Bulan/Jenis/Koran	724.171.055	APBD		Bulan/Jenis/Koran	724.171.055

07	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Listrik/Penerangan Gedung Kantor (rata-rata bulan)	DISKOMINFO	12 bulan	3.044.106	APBD		12 bulan	3.044.106
08	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor	DISKOMINFO	40 Jenis	25.000.027	APBD		40 Jenis	25.000.027
09	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Makanan dan Minuman rapat	DISKOMINFO	12 bulan	18.200.000	ABPD		12 bulan	18.200.000
10	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang cetak dan Peggandaan	DISKOMINFO	12 bulan	21.926.922	ABPD		12 bulan	21.926.922
11	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah koran berlangganan	DISKOMINFO	6 Koran	6.000.000	ABPD		6 Koran	6.000.000
12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Berjalannya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan keluar daerah (rata-rata bulan)	DISKOMINFO	12 bulan	650.000.000	ABPD		12 bulan	650.000.000
(04)	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya penyediaan jasa administrasi perkantoran	DISKOMINFO	12 Bulan	105.361.265	ABPD		12 Bulan	105.361.265
13	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya biaya pengiriman dan materai pertahun	DISKOMINFO	12 bulan	2.850.000	APBD		12 bulan	2.850.000
14	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (rata-rata bulan)	DISKOMINFO	12 bulan	72.000.000	APBD		12 bulan	72.000.000
15	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya dan terpeliharanya kebersihan kantor (rata-rata bulan)	DISKOMINFO	12 bulan	30.511.265	ABPD		12 bulan	30.511.265

	(0 5)	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah	DISKOMINFO	Unit/Set	292.242.000	ABPD		Unit/Set	292.242.000
	16	<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	<i>Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung kantor</i>	DISKOMINFO	7 Unit	40.000.000	ABPD		10 Unit	40.000.000
	17	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan Dinas</i>	<i>Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional</i>	DISKOMINFO	19 Unit	145.000.000	ABPD		19 Unit	145.000.000
	18	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	<i>Jumlah pemeliharaan peralatan Kantor dan Mesin Lainnya</i>	DISKOMINFO	15 Unit	33.450.000	APBD		19 Unit	33.450.000
	19	<i>Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	<i>Jumlah pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	DISKOMINFO	1 Unit	53.792.000	APBD		1 Unit	53.792.000
	20	<i>Pengadaan Mebel</i>	<i>Jumlah Mebeleur Kantor</i>	DISKOMINFO	10 Set	20.000.000	APBD		10 Set	20.000.000
	(0 6)	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya disiplin Aparatur dan SDM	DISKOMINFO	60 Stel	73.625.000	APBD		60 Stel	73.625.000
	21	<i>Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya</i>	<i>Jumlah pengadaan pakaian dinas harian dan perlengkapannya</i>	DISKOMINFO	60 Stel	23.625.000	ABPD		60 Stel	23.625.000
	22	<i>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>	<i>Jumlah Aparatur yang mengikuti Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis</i>	DISKOMINFO	10 Orang	50.000.000	APBD		10 Orang	50.000.000
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN								

		PELAYANAN DASAR							
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							
ii.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Cakupan Informasi dan Telekomunikasi	DISKOMINFO	Laporan/Media/Lembaga Penyiaran/Berita/DIP/31 OPD dan 13 Kecamatan	5.494.099.850	APBD		Laporan/Media/Lembaga Penyiaran/Berita/DIP/31 OPD dan 13 Kecamatan	5.494.099.850
(07)	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan informasi dan opini publik	DISKOMINFO	Media, Layanan informasi dan Opini Publik	5.494.099.850	APBD		Media, Layanan informasi dan Opini Publik	5.494.099.850
23	<i>Monitoring Opini dan Aspirasi Publik</i>	<i>Jumlah Laporan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik</i>	DISKOMINFO	12 Laporan	45.875.000	APBD		12 Laporan	45.875.000
24	<i>Pengelolaan Media Komunikasi Publik</i>	<i>Jumlah lembaga penyiaran yang dibina dan diawasi</i>	DISKOMINFO	4 Lembaga Penyiaran	39.450.000	APBD		4 Lembaga Penyiaran	39.450.000
		<i>Jumlah Berita Radio</i>	DISKOMINFO	350 Berita				350 Berita	
25	<i>Pelayanan Informasi Publik</i>	<i>Daftar Informasi Publik</i>	DISKOMINFO	1 DIP Kab.	44.484.000	APBD		1 DIP Kab.	44.484.000
26	<i>Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Media dan Kemitraan komunitas</i>	<i>Jumlah KIM yang dibentuk dibina dn diberdayakan</i>	DISKOMINFO	3 KIM	40.000.000	APBD		3 KIM	40.000.000
27	<i>Layanan Hubungan Media</i>	<i>Jumlah Fasilitas Kemitraan Penguatan Layanan Komunikasi Publik</i>	DISKOMINFO	3 Media : TV, Media Cetak, dan Media Online	5.000.000.000	APBD		4 Media	5.000.000.000

28	<i>Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan</i>	<i>Jumlah Berita Kegiatan Pemkab Tanjab Barat yang diterbitkan</i>	DISKOMINFO	500 Berita	324.290.850	APBD		500 Berita	324.290.850
III.	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase OPD dalam Sistem Jaringan e-Government dan Informasi	DISKOMINFO	100%	3.500.000.000	APBD		100%	3.500.000.000
(08)	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Domain dan Sub Domain	DISKOMINFO	44 OPD/Aplikasi	3.500.000.000	APBD		44 OPD/Aplikasi	3.500.000.000
29	<i>Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah</i>	<i>- Jumlah OPD yang Menggunakan Jaringan Komunikasi data dan banwidh</i>	DISKOMINFO	44 OPD	3.500.000.000	APBD		44 OPD	3.500.000.000
		<i>- Jumlah Menara Telekomunikasi yang diawasi</i>		117 Menara		APBD		117 Menara	
(09)	Pengelolaan e-government Dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya pusat data dan informasi elektronik, aplikasi dan portal perangkat daerah	DISKOMINFO	44 OPD/Kecamatan/Aplikasi/Peserta	213.200.000	APBD		44 OPD/Kecamatan/Aplikasi/Peserta	213.200.000
30	<i>Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik</i>	<i>Tersedianya Aplikasi Sistem Informasi Berbasis Data Base di Lingkungan Pemkab. Tanjab Barat</i>	DISKOMINFO	1 Aplikasi	47.700.000	APBD		1 Aplikasi	47.700.000
31	<i>Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah</i>	<i>Jumlah Sub Domain</i>	DISKOMINFO	44 OPD	99.100.000	APBD		44 OPD	99.100.000

		<i>Daerah</i>							
32	<i>Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)</i>	<i>Tersedianya Portal Perangkat Daerah</i>	DISKOMINFO	44 OPD	66.400.000	APBD		44 OPD	66.400.000
	<i>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</i>								
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Jumlah Sistem dan Statistik Data yang Terintegrasi	DISKOMINFO	44 OPD	250.000.000	APBD		44 OPD	250.000.000
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral Dilingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD Penyelenggara Statistik Sektoral	DISKOMINFO	44 OPD	250.000.000	APBD		44 OPD	250.000.000
33	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral</i>	<i>Jumlah OPD yang menyampaikan data melalui aplikasi satu data</i>	DISKOMINFO	44 OPD	250.000.000	APBD		44 OPD	250.000.000
	<i>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</i>								
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Perangkat Daerah yang telah Menggunakan Sistem Persandian	DISKOMINFO	100%	200.000.000	APBD		100%	200.000.000
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah Pengguna Persandian	DISKOMINFO	44 OPD	200.000.000			44 OPD	200.000.000

34	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-Jumlah surat dari email sanapati - Backup dan Upgred sistem keamanan informasi	DISKOMINFO	3500 Lembar/12 Kali	100.000.000	APBD		3500 Lembar/12 Kali	200.000.000
35	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Sosialisasi internet sehat dan aman	DISKOMINFO	56 Peserta	100.000.000	APBD		56 Peserta	100.000.000
JUMLAH TOTAL					Rp14.728.683.319,00				Rp 14.728.683.319,00

BABV

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2022 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2022, sehingga dapat memberikan manfaat bagi seluruh *stakeholders* terutama bagi masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 sangat ditentukan oleh kesiapan Perangkat Daerah, ketatalaksanaan, Sumber Daya Manusia, dan sumber pendanaannya serta komitmen pimpinan dan seluruh jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Rancangan Renja 2022, setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Hal-hal yang dapat dilakukan pada saat evaluasi Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 adalah target dan indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan dari tema pembangunan yang mengacu pada RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022.

Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 harus benar-benar menjadi acuan kerja bagi bidang-bidang dan sub bidang secara khusus dan Dinas Komunikasi dan Informatika pada umumnya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua dapat melaksanakannya dengan penuh tanggungjawab, kredibel dan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*) Diskominfo dan kinerja pegawainya.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan komunikasi dan informatika yang diemban oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Renja Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang berisi prioritas program dan kegiatan sebagai penjabaran Visi dan Misi, dapat lebih terkoordinasi, terakomodasi, terintegrasikan dan sinergis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, selanjutnya Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) dan APBD.

Kuala Tungkal, Juni 2021

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



ILHAM AHARUDDIN

Pejabat Utama Muda

0620312 199009 1 001

